

SOSIOLOGI PEMBANGUNAN		
Oleh: V. Indah Sri Pinasti & Adi Cilik Pierewan		
Kode:	Jenjang Sekolah: SMA	T/P:3/3

Kompetensi yang diharapkan

Peserta pelatihan mampu mendeskripsikan masalah pembangunan di Indonesia dan memahami tentang teori pembangunan

Indikator pencapaian

1. Dapat mengidentifikasi masalah pembangunan
2. Dapat mengidentifikasi dampak pembangunan
3. Dapat memahami teori modernisasi dan menerapkannya dalam proses pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu ciri khas negara-negara berkembang adalah pada hakekatnya semua negara itu memperlihatkan fertilitas yang jauh lebih tinggi dari yang terdapat pada negara maju atau negara industri. Kependudukan tidak hanya sekedar masalah jumlah tapi juga menyangkut masalah pembangunan serta soal kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Pertambahan penduduk yang sangat cepat menimbulkan aneka permasalahan yang serius bagi kesejahteraan umat manusia sedunia. Seandainya usaha-usaha pembangunan kini telah dilaksanakan benar-benar berhasil meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang meliputi perbaikan tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan umum, serta termasuk pula peningkatan harga diri dan kebebasan untuk memilih

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat dewasa ini sedikit banyak dipengaruhi oleh transisi cepat yang melanda kecenderungan kependudukan dunia. Angka kelahiran di hampir semua negara maju memang sudah terbilang rendah, akan tetapi angka kelahiran di kebanyakan negara-negara berkembang masih terhitung sangat tinggi, apalagi bagi sejumlah negara yang belum lama melaksanakan upaya-upaya pengendalian kelahiran. Di satu sisi, ada yang beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk itu sangat membantu pembangunan

ataupun kemajuan negara. Tapi di sisi lain, penambahan penduduk justru menjadi beban yang akan menghambat usaha pembangunan suatu negara, apabila proses menuju pembangunan itu sendiri tidak berjalan efektif. Sebenarnya masalah yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya masalah kependudukan, tapi masalah akan muncul satu demi satu jika masalah kependudukan ini tidak bisa teratasi. Masalah kebutuhan, kesejahteraan, kualitas SDM dan lain sebagainya melekat pada penduduk di segala penjuru dunia.

Masalah pembangunan ternyata tidak hanya terletak pada jumlah penduduknya yang sangat tinggi, tapi lebih pada masalah dibalik adanya penyebab dan dampak dari ledakan penduduk itu sendiri. Latar belakang atau penyebab utama terjadinya perubahan kecenderungan kependudukan secara mendadak selama perjalanan sejarahnya itu adalah teratasinya hampir semua masalah yang menimbulkan gejala yang berisiko hilangnya nyawa serta lonjakan kematian manusia secara besar-besaran seperti musibah kelaparan, wabah penyakit, kekurangan gizi, dan perang. Tetapi itu semua telah mendapatkan perhatian, sebagai konsekuensi dari pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi, angka kematian dapat menurun. Dengan menurunnya angka kematian yang disebabkan oleh kemajuan-kemajuan teknologi yang begitu pesat dalam dunia kedokteran dan farmasi atau obat-obatan merupakan penyebab atas melonjaknya pertumbuhan penduduk seluruh dunia khususnya bagi Negara Dunia Ke-Tiga.

BAB II

TEORI MODERNISASI DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA

Jika mengkaji tentang pembangunan di Indonesia, maka teori modernisasi merupakan teori yang paling dominan menentukan wajah pembangunan di Indonesia. Ada dua teori besar yang mempengaruhi teori Modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsional. Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana asumsi teoretis teori Modernisasi dan implikasinya bagi pembangunan di Indonesia.

Asumsi teori modernisasi merupakan hasil dari konsep dari metafora teori evolusi. Menurut teori teori evolusi, perubahan sosial bersifat linear, terus maju dan perlahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitive menuju ke tahapan yang lebih maju. Berdasarkan asumsi tersebut, maka para teoretikus perspektif modernisasi membuat kerangka teori dan tesis dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Pertama, modernisasi merupakan proses bertahap. Teori Rostow tentang tinggal landas membedakan berbagai fase pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai oleh masyarakat, diawali dengan masa primitif dan sederhana menuju masyarakat menuju dan berakhir pada tatanan yang maju dan kompleks. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Indonesia, pada saat teori modernisasi digulirkan, Indonesia masih dalam suatu kondisi yang sangat memprihatinkan sebagai produk jajahan. Masyarakat yang tradisional dan belum bersentuhan dengan dunia teknologi dan tatanan hidup yang kompleks. Pada saat awal negara Indonesia merdeka, kondisi Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang primitive. Kemudian pada saat Indonesia memulai dengan babak baru, yaitu pada masa Orde Baru, maka pada saat inilah adopsi terhadap konsep modernisasi dimulai. Seperti sudah dipahami oleh banyak pihak, bahwa pembangunan di Indonesia memang sangat bernuansa teori modernisasi, hal ini tidak mengherankan karena sebagian besar konsultan pembangunan Indonesia merupakan ahli di bidang teori Modernisasi. McClelland merupakan salah satu contoh konsultan pembangunan Indonesia yang banyak mewarnai proses pembangunan di Indonesia.

Kedua, modernisasi sebagai proses homogenisasi. Tidak terbantahkan bahwa proses modernisasi merupakan sebuah proses yang menuntut kesamaan dan kemiripan, dan hal ini menjadi indikator bahwa proses pembangunan dikatakan berhasil. Proses homogenisasi ini terjadi dalam beberapa tingkat, yang pertama homogenisasi internal, yaitu homogenisasi yang terjadi di dalam negara tersebut. Artinya, diantara masyarakat sudah tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang kedua adalah homogenisasi eksternal yaitu kemiripan dan kesamaan antara negara maju dan negara berkembang. Watak homogenisasi ini merupakan salah satu target para pemikir teori Modernisasi untuk melaksanakan pembangunan secara efektif. Walaupun dengan watak tersebut, modernisasi menghadapi kritik yang besar, bahwa ternyata ide homogenisasi ini hampir tidak mungkin untuk bisa terwujud. Karena proses transfer budaya antara negara maju dan negara berkembang, merupakan transfer yang evolutif sehingga hal ini membutuhkan waktu yang relative lama untuk dapat mewujudkan target homogenisasi.

Ketiga, modernisasi merupakan proses *Eropanisasi* dan *Amerikanisasi* atau yang lebih populer bahwa modernisasi itu sama dengan barat. Hal ini terlihat bahwa keberhasilan itu merupakan sesuatu yang bersifat barat. Negara barat merupakan negara yang tak tertandingi dalam kesejahteraan ekonomi dan politik. Dan negara maju ini dijadikan mentor bagi negara berkembang. Dalam hal yang lebih nyata, kebijakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi sepenuhnya mencontoh hal-hal yang dilakukan negara maju tanpa memperhatikan factor budaya dan sejarah local negara berkembang. Walaupun, saat ini negara maju sedang mengalami krisis ekonomi yang dahsyat dan kenyataannya negara berkembang masih belum terimbas secara besar-besaran. Hal ini menunjukkan bahwa teori Modernisasi sedang menghadapi kritik yang hebat. Perbaikan terhadap teori Modernisasi terutama praktek-praktek pembangunan di negara berkembang perlu dilakukan.

Keempat, modernisasi merupakan proses yang tidak mundur. Proses modernisasi merupakan proses yang tidak bisa dihentikan ketika sudah mulai berjalan. Dengan kata lain ketika sudah melakukan kontak dengan negara maju

maka dunia ketiga tidak mampu menolak proses selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dalam proses bagaimana negara berkembang terus menerus meminta bantuan negara maju untuk dapat membantu baik secara financial maupun intervensi kebijakan politik. Hanya sedikit dari negara dunia ketiga yang melakukan penolakan terhadap asumsi yang keempat dari teori Modernisasi ini, yaitu Korea Utara dan Iran yang secara tegas menolak intervensi yang dilakukan oleh negara maju.

Kelima, modernisasi merupakan perubahan progresif. Hal ini memang diterima oleh para pemikir pembangunan, namun demikian efek samping dari proses ini merupakan suatu proses yang memakan banyak korban yang secara sosial tentu saja berbiaya mahal. Sebagai contoh pada saat pembuatan waduk Kedungombo, maka masyarakat sekitar Kedungombo merupakan elemen yang paling dikorbankan dan ongkos sosial yang juga semakin mahal. Belum lagi contoh-contoh proses modernisasi yang melibatkan atau mengorbankan banyak orang, paling mudah dilihat adalah proses pembuatan jalan tolo di Jawa yang tentu saja akan mengeluarkan ongkos sosial yang tidak sedikit.

Keenam, modernisasi memerlukan waktu panjang. Karena modernisasi merupakan proses evolusioner, sehingga perubahan yang dapat dilihat juga tidak serta merta cepat. Dengan demikian, dibutuhkan waktu yang lama untuk melihat perubahan yang dialami, bahkan membutuhkan waktu antar generasi untuk melihat seluruh proses yang dijalankan modernisasi, termasuk akibat yang dialami proses modernisasi.

Jika tilikan modernisasi didasarkan atas teori fungsional, maka teori modernisasi mengandung asumsi bahwa modernisasi merupakan proses sistematis, transformasi, dan terus-menerus. *Pertama*, sebagai proses sistematis. Proses modernisasi merupakan proses melibatkan seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, sekularisasi, sentralisasi. Dan hal ini membentuk wajah modernisasi sebagai sebuah bentuk yang teratur disbanding sebuah proses yang tidak beraturan. *Kedua*, sebagai proses transformasi. Proses ini memberi arti atau makna bahwa modernisasi merupakan proses yang membentuk dari sebuah kondisi tradisional menjadi

modern dalam segala aspek sosial budaya. Ketiga, sebagai proses yang terus-menerus. Proses modernisasi melibatkan perubahan sosial yang terus-menerus. Sekali perubahan sosial terjadi, aspek sosial yang lain juga akan ikut terpengaruh. Hal ini kemudian saling menguatkan proses perubahan sosial dan modernisasi.

Selanjutnya, akan dibahas tentang teori-teori pilihan yang termasuk dalam teori Modernisasi.

1. Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi

Teori Harrod-Domar merupakan salah satu teori yang terus dipakai dan terus dikembangkan. Teori ini dicetuskan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod, yang bekerja terpisah namun menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah. Hal ini bisa dijumpai pada negara maju dan berkembang, masyarakat di negara maju merupakan masyarakat yang memiliki investasi yang tinggi yang diwujudkan dalam saham, danareksa, indeks, dan bentuk investasi yang lain. Contoh paling dekat dapat dilihat bagaimana masyarakat Singapura memiliki tingkat investasi yang tinggi dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Asumsi yang mendasari teori ini bahwa masalah pembangunan pada dasarnya adalah masalah investasi modal. Jika investasi modal sudah berkembang baik, maka pembangunan ekonomi negara tersebut juga akan berkembang baik. Maka, salah satu implikasi dalam pembangunan di Indonesia, pemerintah mendorong penanaman investasi dan hal membuat investasi tumbuh subur di Indonesia. Pemerintah Indonesia berpijak dari teori Harrod-Domar, sampai membuat suatu lembaga yaitu Penanaman Modal Nasional, karena langkah ini dianggap sebagai langkah strategis untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Walaupun demikian, terjadi suatu ironi yang terjadi di Indonesia, ketika penanaman modal dilakukan secara masal oleh negara asing dan membeli aset startegis yang dimiliki oleh bangsa. Alih-alih menjaring investasi agar besar, yang terjadi adalah penggerogotan asset negara. Maka dari itu, salah satu kritik terhadap teori ini bahwa teori sangat mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Salah satu aspek yang tidak dibahas adalah aspek manusia, karena menurut Harrod-

Domar yang penting adalah menyediakan modal, masalah manusia setiap negara sudah memilikinya. Implikasinya, pengembangan kualitas manusia tidak menjadi perhatian Harrod-Domar.

2. Max Weber: Etika Protestan

Teori Weber tertarik untuk membahas masalah manusia yang dibentuk oleh budaya di sekitarnya, khususnya agama. Weber tertarik untuk mengkaji pengaruh agama, pada saat itu adalah protestanisme yang mempengaruhi munculnya kapitalisme modern di Eropa. Pertanyaan yang diajukan oleh Weber adalah mengapa beberapa negara di Eropa dan Eropa mengalami kemajuan yang pesat di bawah system kapitalisme. Setelah itu, Weber melakukan analisis dan mencapai kesimpulan bahwa salah satu penyebabnya adalah Etika Protestan.

Kepercayaan atau etika protestan menyatakan bahwa hal yang menentukan apakah mereka masuk surge atau masuki neraka adalah keberhasilan kerjanya selama di dunia. Apabila dia melakukan karya yang bermanfaat luas maka dapat dipastikan bahwa dia akan mendapatkan surga setelah mati. Semangat inilah yang membuat orang protestan melakukan kerja dengan sepenuh hati dan etos kerja yang tinggi. Dengan demikian, seluruh pekerjaan yang dilakukan akan serta-merta menghasilkan surga dan agregat semangat individual inilah yang memunculkan kapitalisme di Eropa dan Amerika.

Hasil penelitian Weber ini merupakan penelitian pertama yang menghubungkan antara agama dan pertumbuhan ekonomi. Dan jika diperluas, maka agama bisa menjadi sebuah kebudayaan dan hal ini kemudian merangsang penelitian mengenai bagaimana hubungan antara kebudayaan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, istilah Etika Protestan ini menginspirasi Robert Bellah yang menulis tentang agama Tokugawa yang ada di Jepang dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Jepang, hal itu bisa dilihat bagaimana tingginya pertumbuhan ekonomi di Jepang. Hal ini tentu saja relevan jika diterapkan di Indonesia, bahwa semangat agama di Indonesia dapat mendukung, mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3. David McClelland: Dorongan Berprestasi

Pertanyaan besar yang dimunculkan oleh McClelland adalah apakah yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan pada banyak masyarakat di dunia. McClelland sangat terpengaruh oleh pandangan Weber dalam Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang memandang bahwa semangat kapitalisme sangat dipengaruhi oleh nilai individual yang dimiliki oleh seseorang. Dasar ini menjadi sangat penting dalam pengembangan teorinya tentang dorongan berprestasi. McClelland berpendapat bahwa pada dasarnya jika sebuah masyarakat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka yang perlu diubah adalah dorongan berprestasi individu yang ada dalam masyarakat.

McClelland kemudian melakukan penelitian terhadap dokumen kesusasteraan dari jaman Yunani seperti puisi, drama, pidato, epic dan sebagainya. Karya tersebut dinilai oleh para ahli independen, apakah di dalam karya tersebut terdapat n-ach atau dorongan berprestasi atau tidak. Jika karya tersebut mengandung optimisme yang tinggi, keberanian untuk mengubah nasib, tidak cepat menyerah. Jika tidak, maka nilai n-ach nya rendah. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi didahului oleh n-ach yang tinggi, demikian pula sebaliknya.

McClelland menyimpulkan bahwa n-ach merupakan semacam virus yang perlu ditularkan kepada orang-orang dimana masyarakatnya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu implikasi praktis yang terjadi di Indonesia adalah diadakannya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan n-ach ini yaitu dengan achievement motivation training (AMT) yang sering diselenggarakan di Indonesia. Sampai saat ini metode pelatihan untuk meningkatkan motivasi berprestasi sering dilakukan dan tentu saja bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

4. W.W. Rostow: Lima Tahap Pembangunan

Rostow adalah seorang ahli ekonomi. Perhatian terhadap pembangunan yang dilakukan Rostow adalah pengkajian terhadap proses pembangunan, dimana Rostow menjabarkan menjadi Lima Tahap Pembangunan, yaitu:

- a. Masyarakat Tradisional
- b. Prakondisi untuk Lepas Landas
- c. Lepas Landas
- d. Bergerak ke Kedewasaan
- e. Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi

Melalui lima tahap pembangunan itu, maka dapat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat apakah kesemua proses tersebut sudah dijalankan oleh suatu negara. Dan dasar pembedaan lima tahap ini merupakan pembedaan dikotomis antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Rostow menyebutkan bahwa negara yang melindungi kepentingan usahawan untuk melakukan akumulasi modal maka, negara sudah mulai menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini nampak bahwa Rostow sangat terpengaruh teori Harrod-Domar tentang tabungan dan investasi.

5. Bert F. Hoselitz: Faktor-faktor Non-ekonomi

Hoselitz mengkaji faktor-faktor non-ekonomi yang tidak dikaji oleh Rostow. Faktor tersebut sebagai factor kondisi lingkungan yang penting dalam proses pembangunan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa factor ekonomi sangat penting dalam proses pembangunan, namun factor kondisi lingkungan seperti perubahan kelembagaan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat mempersiapkan kondisi yang mendukung untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Faktor non ekonomis yang penting antara lain pemasokan tenaga ahli dan terampil. Bahwa salah satu factor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, diperlukan sebuah penyediaan tenaga terampil yang memadai, karena jika hanya

didukung oleh modal dan investasi saja, maka proses pembangunan juga tidak berjalan lancar.

Salah satu hal menarik dari pemikiran Hoselitz ini adalah penekanannya pada aspek kelembagaan yang menopang pembangunan seperti lembaga pendidikan, mobilisasi modal. Dan dari factor-faktor individual dan budaya, Hoselitz bergerak untuk mengkaji masalah yang lebih nyata yaitu lembaga politik dan sosial.

6. Inkeles-Smith: Manusia Modern

Inkeles dan Smith juga mengkaji tentang pentingnya faktor manusia sebagai factor penting dalam penopang pembangunan. Pembangunan bukan sekedar masalah pemasokan modal dan teknologi saja. Aspek manusia penting sekali sebagai pelaksana teknologi atau pelaku utama proses pembangunan yang berlangsung. Maka Inkeles dan Smith kemudian memberikan ciri-ciri manusia modern, antara lain: keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, punya kesanggupan merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam.

Berdasarkan kajiannya, Smith-Inkeles menemukan bahwa pendidikan adalah lembaga paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan dipandang tiga kali lebih efektif dibanding pendekatan yang lain. Jika melihat kondisi Indonesia, salah satu yang krusial untuk dkembangklan adalah pendidikan, jika negara ingin modern dan peertumbuhan ekonomi tinggi, maka perhatian terhadap pendidikan harus besar.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pembangunan di Indonesia

Menurut pandangan Mansour Fakih (2006; 10) umurnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, ‘pembangunan’ disejajarkan dengan kata ‘perubahan sosial’. Dalam fenomena pembangunan yang kronis sesungguhnya tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomis atau sekedar mengukur tingkat pendapatan dan juga tidak terbatas berupa masalah perhitungan masalah ketenagakerjaan atau penaksiran tingkat ketimpangan penghasilan secara kuantitatif. Selain itu semua, suatu lingkungan dan kesempatan sangat mempengaruhi kemajuan tingkat kesejahteraan penduduk. Kebanyakan itu semua masih dijumpai dalam negara-negara yang sedang berkembang. Kelaparan, keputusan dan kematian membuat semakin sempit gerak bagi penduduk yang berada di bawah garis kemakmuran.

Indeks ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) atau GNP per kapita (dalam Todaro, 2000). Indeks ini pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan penduduknya. Tingkatan dan laju pertumbuhan GNP per kapita “riil” (yakni, sama dengan pertumbuhan GNP per kapita dalam satuan moneter dikurangi dengan inflasi merupakan tolok ukur ekonomis yang paling sering, digunakan untuk mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomis dari suatu bangsa. Berdasarkan tolok ukur tersebut, maka akan dimungkinkan untuk mengetahui seberapa banyak barang dan jasa-jasa riil yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi.

Istilah pembangunan secara luas sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang “lebih baik” atau “lebih manusiawi”. Jadi, pada hakekatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergeser lebih maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual. Menurut pendapat Profesor Goulet (dalam Todaro, 2006: 21) mengatakan bahwa paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki, ketiga komponen itu adalah: kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*), serbat kebebasan (*freedom*). Ketiganya berkaitan dengan kebutuhan manusia yang hampir semua masyarakat. Tujuan inti pembangunan dari ketiga komponen itu adalah:

1. peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok.
2. peningkatan standar hidup, tidak hanya meningkatkan pendapatan saja tetapi juga peningkatan pendidikan dan kemanusiaan untuk memperbaiki kesejahteraan serta jati diri.
3. perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial, membebaskan dari sikap ketergantungan.

Seperti yang diketahui bahwa pada dasarnya salah satu tujuan pokok pembangunan adalah menciptakan keseluruhan pola pertumbuhan pendapatan yang diinginkan dengan penekanan khusus akselerasi golongan miskin. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan mulia tersebut, negara-negara berkembang jelas memerlukan strategi yang selama ini dijalankan yang hanya berorientasikan pada maksimalisasi laju pertumbuhan GNP.

Pembangunan, bagi mayoritas masyarakat, dianggap sebagai suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, infrastruktur masyarakat, dan lain sebagainya, sehingga istilah “pembangunan” sering kali disejajarkan dengan

istilah “perubahan sosial”. Bagi penganut pandangan ini, konsep pembangunan adalah berdiri sendiri dan membutuhkan keterangan lain, seperti pembangunan model kapitalisme, pembangunan model sosialisme, pembangunan model Indonesia, dan lain sebagainya. Dengan demikian, teori - pembangunan merupakan sebuah teori sosial ekonomi yang bersifat sangat umum. Di lain pihak, terdapat suatu pandangan yang lebih minoritas yang berangkat dari asumsi bahwa kata “pembangunan” itu sendiri adalah sebuah “discourse” atau suatu pendirian, Suatu paham, atau bahkan disebut suatu ideologi tertentu terhadap perubahan sosial. Dalam pandangan ini, konsep pembangunan itu sendiri bukanlah merupakan kata yang bersifat netral, melainkan suatu “aliran” dan keyakinan ideologi dan teoretik serta praktek mengenai perubahan sosial, sebagaimana teori-teori sosialisme, atau teori-teori lainnya. Dengan demikian, teori pembangunan dapat dianggap sebagai “pembangunanisme”.

Gagasan dan teori pembangunan sampai saat ini telah dianggap sebagai “agama baru” karena mampu menjanjikan untuk dapat memecahkan masalah-masalah kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami oleh berjuta-juta masyarakat di banyak negara. Istilah pembangunan tersebut telah menyebar dan digunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini kebenaran dan keampuhannya oleh masyarakat secara luas. Setiap program Pembangunan menunjukkan dampak yang berbeda tergantung pada konsep dan lensa Pembangunan yang digunakan.

Konsep Pembangunan yang dominan dan telah diterapkan dikebanyakan negara merupakan pencerminan paradigma Pembangunan Model Barat. Dalam konsep tersebut, pembangunan dipahami sebagai proses tahap demi tahap menuju “modernitas”, yang tercermin dalam bentuk kemajuan teknologi dan ekonomi sebagaimana yang dilalui oleh bangsa-bangsa industri maju. Di sebagian besar negara, penaksiran konsep Pembangunan dipahami sebagai perbaikan umum dalam standard hidup, disamping itu juga dipahami sebagai sarana memperkuat negara melalui proses industrialisasi dengan pola seragam antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi utama atau

menjadi subyek pembangunan, sedangkan masyarakat menjadi obyek dan penerima dari dampak pembangunan.

Globalisasi memasuki negara dunia ketiga tanpa mampu dibendung. Dalam keterbelakangan, negara dunia ketiga tentu tidak dapat menghindari arus globalisasi. Dengan segala keterbatasan, tentu saja di butuhkan sebuah strategi pembangunan yang matang. Utamanya menyangkut peran dan fungsi negara dalam menyelamatkan kepentingan nasional. Satu diantaranya yaitu asas kekeluargaan, sebagaimana dirumuskan melalui postulat ideologi. Dan tentunya, siasat menyikapi pihak asing dan kapitalisme transnasional, serta berbagai inflasi ketergantungan yang sangat mungkin ditimbulkan dari hubungan yang tidak seimbang.

Indonesia termasuk negara Dunia ketiga, di mana negara Indonesia masih banyak kekurangan sehingga masih butuh untuk membangun infrastruktur. Di sini, industri belum berjalan baik, masih banyak yang belum tercapai. Negara dunia ketiga adalah negara yang kemampuan ekonomi dibawah standard dunia. Untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan, maka Indonesia dalam suatu proses pembangunan segala bidang.

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan secara sengaja menuju keadaan atau dinamika yang lebih baik, berorientasi ke masa depan, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Konsep pembangunan dicetuskan dimana, ketika itu dunia mulai menyadari adanya ketimpangan antara negara dunia ketiga (negara sedang berkembang) dengan negara maju (industri). Dan ketika dunia mulai menyadari juga adanya ketergantungan yang tinggi negara dunia ketiga kepada negara maju, maka dunia terbuka karena jika di biarkan maka kehidupan dunia semakin tidak harmonis.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia, membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pembangunan Indonesia dilaksanakan di segala bidang kehidupan, sehingga dampak pembangunan juga terjadi di segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, maka pembahasan mengenai Dampak Pembangunan Dalam Bidang Politik hanya akan dibahas mengenai dampak pembangunan dalam bidang politik dan analisisnya dilihat dari teori modernisasi.

Arti modernisasi menurut Weiner (1981) menunjukkan bahwa tidak mudah untuk membuat suatu batasan mengenai suatu arti yang sifatnya generis, atau mampu merangkum dan mewakili dari satupun yang bersifat umum untuk merangkum dari suatu sistem pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan yang “modern”, oleh karena itu menurut Weiner (1981) dibutuhkan kesepakatan bersama untuk merangkum dan mendeskripsikan pengertian dari modernisasi tersebut, akhirnya para sarjana menyarankan agar titik tolak dari setiap rumusan modernisasi tidaklah pada watak masyarakat, melainkan pada watak perorangan. Misalnya, seorang ahli sejarah, Cyrill Black, menggambarkan bahwa dalam masyarakat modern ditandai dengan bertumbuhnya ilmu pengetahuan baru dan ini menganggap adanya manusia yang memiliki kemampuan yang semakin meningkat untuk memahami rahasia-rahasia alam dan untuk menerapkan kemampuan ini untuk kegiatan manusia itu sendiri diperoleh dari orientasi individualnya, bukan semata-mata dari kelompok.

Sehingga adanya kesepakatan tersebut maka Weiner memberikan pendefinisian tentang modernisasi sebagai semua rumusan mengenai arti penekanan tentang cara-cara baru dalam berfikir yang memungkinkan manusia menciptakan industri modern, masyarakat modern, serta pemerintahan modern.

Dalam prosesnya modernisasi mengalami serangkaian perkembangan yang bersifat menglobal, modernisasi dimulai di Italia dalam abad ke-15 dan menyebar sebagian besar dunia barat dalam lima abad berikutnya, manifestasinya proses modernisasi pertama kali nampak di Inggris pada abad ke-18 yang disebut dengan revolusi industri dan pengaruhnya meluas ke Asia pada pertengahan abad ke-20 yang terlihat dari industrialisasi Jepang, dan hal inilah yang membawa kekhawatiran negara-negara barat yang dalam pemikirannya terhadap perkembangan negara-negara dunia ketiga sebagai ancaman. Oleh karenanya Amerika dan negara-negara Eropa Barat menyadari situasi ini sehingga mereka mendorong para ilmuwan sosial mengembangkan teori-teori yang dapat menarik

dan dapat diaplikasikan di negara-negara dunia ketiga, namun dapat tetap menumbuhkan kapitalisme itu sendiri. Oleh karenanya dibidang sosial, mulai dilakukan rekayasa sosial melalui penyusunan teori-teori sosial yang diintroduksikan ke negara-negara berkembang adalah teori modernisasi (teori pembangunan) yang dikembangkan Amerika sejak 1948, diintroduksikan teori modernisasi ke negara dunia ketiga ini karena menurut pandangan barad negara-negara tersebut sebagai negara yang masih dalam proses modernisasi, khususnya dalam proses pertumbuhan ekonominya.

Teori modernisasi (teori pembangunan) dengan demikian bukanlah teori yang bebas nilai. JW. Schoorl (1988), bahwa proses modernisasi oleh karenanya cara melaksanakan modernisasi juga ada hubungannya dengan nilai-nilai dan norma-norma yang digunakan. Mengingat teori modernisasi dibangun diatas landasan kapitalisme, maka nilai-nilai yang mendukungnya jelas bernuansa kapitalis.

Indikasinya penerapan teori modernisasi sebagai kebijakan pembangunan negara dunia ketiga merupakan peluang bagi negara-negara kapitalis untuk mengembangkan usahanya secara besar-besaran melalui perusahaan multinasional dalam mengeksploitasi sumber kekayaan yang ada, sedemikian rupa dijadikan sebagai pemasok bahan baku sebagai bagian dari rangkaian proses perdagangan multilateral.

Negara dunia ketiga seperti halnya Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dimana didalam negara yang sedang berkembang permasalahan utama dalam mengakses, memanfaatkan, menggunakan, dan menerapkan IPTEK menjadi permasalahan utama, atau singkatnya tentang kualitas SDM-nya, dari kualitas SDM dalam kemampuan menguasai dan menerapkan IPTI K, tercermin kondisi sosial, kesehatan, demografi, budaya, tingkat pendidikan, ekonomi (miskin-kaya), dan kemampuan memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungannya. Oleh karena itu berlaku “sumber daya dibatasi secara budaya” (culturally defined resources), dimana didalamnya negara atau bangsa yang masyarakatnya memiliki sumber daya alam yang kaya tidak dapat menikmati kemampuan dari potensi dari sumber daya tadi, bila kemampuan

budayanya (penguasaan IPTEK) masih rendah, di lain pihak negara, bangsa yang masyarakatnya hanya memiliki sumber daya alam yang terbatas, mampu memanfaatkan sumber daya yang terbatas tadi bagi kemakmuran masyarakatnya, bahkan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain, untuk di eksploitasi karena kualitas SDM mereka yang sanggup menguasai IPTEK. Bukankah itu hal yang ironis bagi negara seperti Indonesia yang luar biasa sumber dayanya yang hanya menjadi lahan eksploitasi bagi negara-negara, maju (negara industri) saja.

Pokok masalah dimana negara-negara maju seolah-olah mampu mendikte masyarakat, bangsa, negara yang sedang berkembang dalam berbagai bidang kehidupannya, meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan politik mengindikasikan negara, bangsa, yang penguasaan IPTEK-nya relatif lemah (kualitas SDM) akan menjadi “obyek” dari negara-negara maju, sehingga pola ketergantungan sudah menjadi “rantai setan” yang harus segera di putus, harus segera dicari jalan keluarnya, karakteristik masyarakat dari negara-negara sedang berkembang (dunia ketiga) seharusnya bukan merupakan kelemahan, tetapi sudah menjadi potensi atau kekuatan yang harus dikembangkan, caranya tentu saja yang utama adalah **dengan meningkatkan potensi dari karakteristik negara dunia ketiga, peningkatan kualitas SDM, khususnya dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pendidikanlah merupakan jalur yang paling relevan.**

Dari hal tersebut tentu kita dapat melihat adanya fenomena global yang positif antar negara di dunia ini, artinya adanya pola sating ketergantungan besar artinya bagi masing-masing kelompok negara. Di mana yang sebelumnya negara-negara maju, cenderung tidak memandang banyak tentang ketergantungan mereka terhadap sumber daya, bangsa lain. Tetapi seiringnya waktu, mereka akan berorientasi juga memikirkan hal tersebut sebagai hal yang serius. Nah, seharusnya hal inilah yang harus menjadi perhatian mendasar negara-negara dunia ketiga dan negara terbelakang untuk mulai melepaskan tingkat ketergantungan mereka yang terlalu banyak, terhadap negara maju, potensi sumber alam yang besar tersebut harus dijadikan senjata untuk kemakmuran rakyat, bangsanya.

Dimana untuk merealisasikannya negara harus sanggup meningkatkan, mengembangkan kualitas SDM-nya sedemikian rupa untuk mengimbangi potensi “SDM-nya yang melimpah tersebut, salah satu langkah adalah dengan mengembangkan karakteristik masyarakat dunia ketiga, dalam kerangka pengembangan, penguasaan, pemanfaatan, serta penerapan IPTEK. Dan karakteristik masyarakat dunia ketiga yang perlu mendapat perhatian serius tersebut adalah sebagai berikut

1) Terkait permasalahan ekonomi

Dalam permasalahan ekonomi dari negara dunia ketiga merupakan ajang yang besar yang sering disebut dengan mata rantai lingkaran setan, yang mana dalam lingkungannya kemiskinan adalah gejala yang selalu muncul menandakan permasalahan dalam sektor ekonomi, dimana permasalahan tersebut ditandai dengan adanya indikasi dalam bidang ekonomi yang didalamnya ada tentang masyarakat yang tingkat kehidupannya masih rendah, hal ini disebabkan karena rendahnya pendapatan perkapita, sebagai sebab rendahnya tingkat pendapatan nasional yang berpengaruh terhadap kurangnya pemerataan, sehingga dalam struktur yang lebih rendah seperti struktur agraris masih lemah, sedang struktur yang lebih tinggi seperti industri kurang berkembang, akibatnya perkembangan ekonomi menjadi pincang, konsekuensinya terjadi ketergantungan ekonomi yang besar kepada pihak pemodal atau negara maju. Justru dengan hal tersebut maka mata rantai, yang sering disebut dengan “lingkaran setan” kemiskinan dan keterpurukan, akan sulit dilepas, karena jumlahnya akan senantiasa meningkat, sebagai akibat dari daya konsumsi yang besar tidak diimbangi dengan produktifitas yang memadai, akibat kalkulasi ketergantungan dana pinjaman modal yang terlampau besar.

2) Terkait permasalahan sosial

Salah satu faktor yang memungkinkan sulitnya memecah dan memutuskan mata rantai lingkaran setan adalah berkembangnya permasalahan-permasalahan dalam bidang sosial yang tidak segera ditangani sehingga meluas ke struktur masyarakatnya, dimana didalam permasalahan tersebut mengakibatkan struktur sosial menjadi lemah, sebagai pihak pemodal dan biasa masyarakat asing

didalamnya, sehingga sektor menengah atau swasta yang diharapkan ikut berkontribusi, akhirnya tidak memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi, karena kalah dengan pemodal asing, akibatnya kondisi dalam negara tidak kondusif karena akhirnya hasil dari produktifitas akan dikuasai pihak asing dan masalah dalam negeri otomatis bertambah, sebagai akibat angka kelahiran yang tinggi, pengangguran yang meningkat akibat sector kecil yang tergesur, akhirnya kemiskinan dan permasalahan sosial meningkat seperti masalah kesehatan.

3) Terkait permasalahan budaya

Mata rantai lingkaran setan dalam aspek budaya merupakan permasalahan yang kompleks, karena merupakan masalah yang sensitif yang berkaitan erat dengan pola tradisi dan kebiasaan yang sudah terinternalisasi dalam diri individu atau masyarakat, artinya segi-segi negatif tersebut sudah menjadi hal yang umum dalam kehidupan masyarakat, di lain hal yang positif, sehingga hal-hal yang autentik yang sebenarnya merupakan hal yang pokok menjadi terabaikan, yaitu seperti tingkat pendidikan yang rendah, sebagai akibat dari orientasi tradisional, sikap malas, sebagai akibat laju perkembangan masyarakat miskin dan kalangan bawah tidak konsisten, sebagai konsekuensi dari pola-pola tradisional yang bersifat tertutup sulit terbuka menerima ide-ide dan pengetahuan yang baru sebagai pengarah peningkatan kualitas SDM-nya.

4) Terkait permasalahan politik

Orientasi dari permasalahan politik sebenarnya terkait pada sikap politik negara dunia ketiga seperti juga Indonesia, dalam menyikapi pola berhubungan dan ketergantungan dengan negara lain.

Oleh karenanya di dalam menyikapi permasalahan politik salah satu nilai yang harus melekat pada diri kita sebagai warga negara bangsa Indonesia yaitu “kemandirian”. Dalam dinamika kerja sama dan saling ketergantungan, kemandirian tersebut memperkuat serta kedudukan kita di tengah-tengah bangsa yang lain. Kemandirian merupakan kekuatan internal yang menjaga diri dari pendiktean dari permainan pihak lain yang bermaksud mencari keuntungan dari kelemahan yang kita punya., kemandirian ini merupakan sumber kewibawaan.

Dengan jati diri, kemandirian, dan kewibawaan selaku warga negara bangsa-bangsa di dunia kita bangsa Indonesia tidak akan terpuruk, larut kepada dampak-dampak negatif dan intervensi politik dari pihak asing, yang berusaha menyudutkan Indonesia sebagai lahan keuntungan yang siap dieksploitasi. Artinya kita harus segera memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa menjadi modal dasar bekerja sama dengan negara, bangsa manapun di dunia ini khususnya dalam kerangka memperkuat struktur dan eksistensi politik kita dimata dunia internasional ini.

Penetrasi globalisasi sebagai era modernisasi memiliki berbagai dampak, berdampak ganda bisa dimaknai positif dan betendensi negatif. Di satu sisi modernisasi dapat berimplikasi positif, yaitu akan menyebabkan munculnya masyarakat megakompetisi, dimana setiap orang akan berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik pula. Untuk kompetisi ini diperlukan kualitas yang tinggi, era modernisasi adalah era untuk mengejar keunggulan dan kualitas, sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Teretleksi pada: (1) upaya membuka tabir kehidupan universal dalam perspektif lokal, mereduksi keterbelakangan masyarakat lokal dari realitas hidup, ditengah-tengah kehidupan yang mereka hadapi sehariannya ternyata kemajuan modernisasi yang idealnya bisa mereka manfaatkan. (2), pengakuan internasional atas eksistensi nasional dan potensi lokal dalam kancah pengaulan dunia. Masyarakat dunia dibawah payung PBB semakin mengarah ke upaya dan strategi pengentasan kemiskinan dan perbaikan hidup masyarakat dunia (Millenium Development Goals), (3), suka atau tidak suka, modernisasi akan merangsang semakin terwujudnya model-model pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang semakin baik dan benar (good government).

Secara negatif modernisasi bisa menjadi ancaman terhadap budaya, modernisasi akan melahirkan budaya global dan akan menjadi ancaman bagi budaya lokal, atau budaya bangsa. Rendahnya tingkat pendidikan akan menjadi salah satu penyebab cepatnya masyarakat terseret oleh arus modernisasi dengan menghilangkan identitas diri atau bangsa. Berimplikasi pada, (1), memperbesar ketergantungan ekonomi nasional/lokal (dependent economy) terhadap sumber-

sumber utama pembangunan (modal-kapital, ilmu-teknologi, dan manajemen-sumber daya manusia) yang sebagian besar dikuasai dan secara ekonomi dikendalikan oleh negara-negara maju. (2), kemungkinan runtuhnya norma-norma sosio-kultural lokal yang telah lama mentradisi dan menjadi pilar utama interaksi dan kontak sosial maupun transaksi ekonomi dan komersial. Modernisasi yang menyertai globalisasi secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pada pergeseran nilai adat dan bergeser ke nilai-nilai baru. (3), eksploitasi berlebih sumber daya alam lokal karena adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi internasional. Modernisasi selalu masuk melalui investasi asing, transaksi komersial atau barang produksi dan juga pola-pola konsumsi tinggi (high mass consumpten) masyarakat maju. Peningkatan investasi. proses industrialisasi dan modernisasi gaya hidup juga menyebabkan peningkatan konsumsi sumber daya alam. Sehingga degradasi ekologi yang berdampak pada pemanasan global tidak terlepas dari implikasi negatif modernisasi.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan jawaban untuk memecahkan masalah ketergantungan dan antisipasi terhadap efek yang tidak diinginkan dalam hal ini efek negatif adanya modernisasi, pendidikan merupakan jawaban karena mau tidak mau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sudah menjadi konsumsi publik yang telah menglobal. Setiap usaha pembangunan bangsa diperlukan keikutsertaan setiap warga dan seluruh bangsa. Oleh karena itu, kita hendaknya senantiasa menyumbangkan tenaga dan pikiran, ilmu pengetahuan, ketrampilan, keahlian, dan kemampuannya. Watak dan moral setiap manusia dan seluruh masyarakat harus selalu membimbing dan memberi arah pada segala kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bangsa. dalam pengembangan IPTEK harus dapat mensejahterakan manusia, haruslah dengan cara-cara yang berprilaku manusiawi dan penciptaan haruslah etis dan tidak merugikan setiap manusia. Karena sesungguhnya manusia memiliki, sifat-sifat ingin tahu dan memiliki rasa kepuasan yang bersifat sementara.. Apa saja yang sudah diketahuinya , diraihnya, ingin dikembangkan, atau ditingkatkan lagi, yang membuat manusia cenderung berkembang, terus mengembangkan akal dan kemampuannya.

Artinya pengembangan pendidikan sekarang harus sudah secara komprehensif menyeluruh ke semua bidang kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dan ke semua kalangan besar-kecil, tua-muda, miskin-kaya, tanpa ada kecualinya. Atau membuat IPTEK menjadi suatu bagian pokok dalam hidupnya. Pendidikan yang mengembangkan manusia seutuhnya adalah pendidikan yang secara dini, diupayakan secara sadar dan sistematis, terus menerus untuk mengembangkan tingkat kemampuan, sifat-sifat; sikap-sikap supaya semakin mampu mewujudkan kebahagiaan hidup didasarkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hidup manusia sebagai pribadi dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dengan alam, bangsa-bangsa dalam hubungannya yang kondusif dan saling berkompeten, dan menguntungkan. Jika pengembangan pendidikan tersebut benar-benar sudah direalisasikan secara serius maka lambat laun, sesuai alur dan prosesnya maka dapat untuk memperbaiki, meningkatkan, dan memecahkan segala persoalan bangsa ini, serta lebih jauhnya dapat sebagai modal dasar dan jembatan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, khususnya dalam menghadapi persaingan global dengan berbagai tuntutan modernisasinya yang tidak dapat dihindarkan.

Pembangunan tanpa peran serta atau partisipasi masyarakat tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk peningkatan mutu pembangunan itu sendiri. Agenda peningkatan optimalisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi seperti saat ini semakin memiliki nilai strategis untuk dibicarakan. Hal ini cukup penting, mengingat dari rangkaian pembicaraan yang terjadi, diharapkan akan memunculkan pemikiran-pemikiran, ide-ide serta gagasan-gagasan yang inovatif, kreatif serta berwawasan ke depan bagi kemajuan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat. Dari pembicaraan itu juga, bisa saja ditemukan kesimpulan-kesimpulan yang baik bagi pengembangan serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Sebagaimana kita tahu, saat ini, partisipasi masyarakat telah berada dalam posisi yang semakin penting. Ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari terbukanya

kran kebebasan berekspresi masyarakat akibat proses reformasi yang terjadi tahun 1998 di Indonesia. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka mengkaji serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dilakukan pemerintah.

Dari kondisi tersebut, bermunculanlah lembaga-lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat yang bukan saja sebagai wujud kepedulian terhadap nasib mereka sendiri. Ternyata lembaga-lembaga atau organisasi itu ada pula yang tumbuh menjadi alat-alat atau sarana-sarana bagi mediasi kepentingan masyarakat, termasuk pula kepada pemerintah. Terkait dengan hal itulah, adalah hal yang wajar saat ini jikalau pemerintah sendiri melihat hal ini dengan bijak serta baik sangka. Pemerintah harus pula siap menjadi lebih terbuka, akuntabilitas serta lebih transparan menghadapi iklim yang terjadi di masyarakat saat ini.

Berbagai rencana pembangunan yang dimiliki pemerintah semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat. Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Dari tahun ke tahun, proses pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata juga semakin dikritisi oleh masyarakat. Dan dampaknya, tumbuh bias-bias negatif dari masyarakat terhadap proses pembangunan yang sedang atau akan dilakukan. Salah satu gejala negatif yang muncul di tengah masyarakat, yakni tumbuhnya sebuah sikap yang apatis terhadap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Sekurang-kurangnya, ternyata masyarakat ada yang tidak peduli dengan proses pembangunan yang sedang dan akan dilakukan.

Ini jelas menunjukkan adanya sebuah gejala kurangnya partisipasi masyarakat terhadap agenda pembangunan. Kasus ini misalnya muncul dalam beberapa peristiwa penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Salah satu indikasi yang mungkin timbul bisa jadi karma berangkat dari adanya ketidakberdayaan masyarakat untuk menghadapi masalah internal mereka.

Dari sana tumbuh gejala-gejala kekecewaan yang akhirnya bisa saja terakumulasi pada pemerintah, termasuk ketika pemerintah justru bermaksud

memperbaiki masyarakat lewat agenda pembangunan yang dilakukan. Di samping hal tersebut, bisa jadi pemerintah yang memang kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Meskipun kritik-kritik di atas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan. Yang lebih penting adalah mencari solusi yang sifatnya komprehensif dan sistematis, sehingga setiap masalah yang ada bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Masa modernisasi pengembangan sumber daya manusia Indonesia sangat perlu sekali diupayakan, pengembangan SDM menciptakan pengembangan bentuk masyarakat yang maju tetapi masih berorientasi terhadap kemajuan zaman, dimana masyarakat disiapkan untuk dapat bersaing, mampu menonjolkan basik nilai luhur budayanya sebagai modal dasar dalam menghadapi tantangan global, sehingga di gunakan sebagai keunggulan yang tidak di miliki oleh negara-negara lain, Maka dasar pemikiran harus berorientasi terhadap masyarakat, manusia, dan kebudayaannya dengan corak pendidikannya yang baik, dimana semakin berkembang peradaban manusia, semakin berkembang pula permasalahan yang dihadapi pendidikan, sehingga semakin menuntut kemajuan manusia dalam pemikiran-pemikiran yang sistematis tentang pendidikan. Peranan pendidikan dalam permasalahan kehidupan dan kemajuan umat manusia semakin vital (penting), ini berkaitan dengan semakin perlunya bagi manusia pada umumnya dan pendidik khususnya untuk senantiasa mengembangkan pemahaman yang terus mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Karena pendidikan sangat bermakna bagi kehidupan individu, masyarakat, dan suatu bangsa, khususnya untuk menjawab, sebagai solusi, jembatan mengatasi segala persoalan bangsa, dimana hal tersebut menentukan berhasil tidaknya suatu rencana, program, arah dan tujuan, cita-cita bangsa dan negara. oleh karena itu jika kita semua menginginkan generasi yang akan datang itu baik, dan mampu bersaing terhadap kemajuan zaman, maka budaya ataupun sub-sub kebudayaan yang sekarang ada yang dirasa tidak atau kurang baik harus dirombak dan diganti dengan budaya yang baik sesuai dengan nilai luhur budaya kita melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan yang sistematis dan terencana, sehingga masyarakat dan lingkungannya dipertahankan dan dikembangkan menjadi basik keunggulan bangsa.

Latihan

1. Apakah pembangunan itu? Bagaimana kondisi pembangunan di Indonesia?
2. Bagaimana kondisi kependudukan di Indonesia?
3. Bagaimana pembangunan di berbagai bidang di Indonesia?
4. Bagaimana keterkaitan antara teori modernisasi dengan politik pembangunan?
5. Bagaimana dampak dari modernisasi?

DAFTAR PUSTAKA

- Pranarka, AMW, (1991), *"Tinjauan Kritis Terhadap Upaya Membangun Sistem Pendidikan Nasional Kita"* dalam Conny R. Semiawan & Soedijarto (ed), *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XX*, Penerbit: PT. Grasindo, Jakarta.
- Drs. Jefta Leibo, SU. 1994 . *Sosiologi Pedesaan " Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda "*. Penerbit Andi Offset: Yogyakarta..
- Sajogyo Dan Pudjiwati Sajogyo. 1995. *Sosiologi Pedesaan*. Gajah Mada University Press : Bogor.
- Cholisin, M.si . 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi UNY
- Koentjaraningrat 1971 . *Manusia dan kebudayaan di Indonesia* . Jakarta : PT DJAMBATAN.
- <http://batampos.co.id/globalisasi-dalam-perspektif-lokal.html>
- Schoorl, J.W. 1980. *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. PT. Gramedia, Jakarta.